

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang, objek penelitian yang ditunjuk oleh penulis, desain penelitian yang berisi metode penelitian yang dilakukan penulis, variabel variabel yang digunakan yaitu variabel dependen dan juga variabel variabel independennya.

Berikut akan dibahas teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, alat ukur dan cara perhitungan, dan juga teknik analisis data yang menggunakan regresi linear berganda.

A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta. Unit analisis yang diteliti pada penelitian ini adalah individu individu yang melakukan kegiatan usaha di Jakarta. Sampel dari usahawan di Jakarta juga sudah cukup untuk memenuhi target responden yang ditentukan oleh peneliti.

Sugiyono dalam Dimas Avianto (2017) menyatakan bahwa:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di Jakarta.

Sugiyono dalam Dimas Avianto (2017) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampel random sampling*. *Sample random sampling* adalah pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara ini dilakukan jika anggota populasi bersifat homogen.

B. Metode Penelitian

Menurut Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler dalam *Business Research Method* (2008 : 141), desain penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Tingkat perumusan masalah

Penelitian ini merupakan studi formal karena penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam batasan masalah

2) Metode pengumpulan data

Berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian ini termasuk dalam proses observasi dan wawancara. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan.

3) Pengendalian variabel oleh peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mempunyai kendali atau pengaruh atas variabel-variabel yang ada dan hanya dapat melaporkan apa yang telah terjadi atau sedang terjadi, sehingga penelitian ini termasuk dalam desain penelitian *ex post facto*.

4) Tujuan penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kausal karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel penelitian atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

5) Berdasarkan dimensi waktu

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini merupakan penelitian *cross-sectional*. *Cross-sectional* karena dilakukan pada satu titik waktu tertentu (*at one poin in time*).

6) Berdasarkan ruang lingkup topik pembahasan

Berdasarkan ruang lingkup topik bahasan, penelitian ini termasuk dalam studi statistik yang mementingkan keluasan bukan kedalaman. Studi statistik menguji hipotesis secara kuantitatif karena ingin mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan berdasarkan ciri-ciri sampel.

7) Berdasarkan lingkungan penelitian

Dilihat dari lingkungan penelitian, penelitian ini masuk dalam riset lapangan yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui kuesioner kepada objek penelitian.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya berdasarkan kesadaran sebagai warga negara, tunduk pada hukum, perilaku patuh, dan lingkungan wajib pajak. Menurut Vanesa dan Hari (dalam Nurlaela, 2014) kepatuhan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi) secara langsung. Berdasarkan uraian diatas, maka dikembangkan 15 item pertanyaan yang dapat mengukur variabel tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 3.1
Pengembangan pertanyaan variabel dependen
(tingkat kepatuhan wajib pajak)

Variabel Dependen	Indikator	Instrumen/Pengukur
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran sebagai warga negara	4 item pertanyaan
	Tunduk pada hukum	4 item pertanyaan
	Perilaku patuh	3 item pertanyaan
	Lingkungan Wajib Pajak	4 item pertanyaan

2. Variabel Independen

a. Tes Pengetahuan Perpajakan

Variabel independen dalam penelitian ini diukur dalam ranah pengetahuan kognitif. Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Kesadaran wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka atas peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isi undang undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dapat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non-formal akan berdampak

terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pendidikan perpajakan secara formal didapat dalam materi di sekolah hingga perguruan tinggi sedangkan perpajakan secara nonformal dapat melalui sosialisasi perpajakan berupa penyuluhan, seminar, spanduk, media lainnya terutama dapat diakses melalui web resmi perpajakan. Pemahaman mengacu pada cara seorang individu untuk menilai dan mengerti arti sesuatu. Pengetahuan Perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak dan dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya.

Tingkat pengetahuan dari wajib pajak mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Berdasarkan uraian diatas variabel Pengetahuan Perpajakan dikembangkan 14 item pertanyaan menggunakan skala Guttman dua poin yaitu untuk pernyataan positif mendapat nilai 1 poin untuk jawaban Benar (B) dan 0 poin untuk jawaban Salah (S) sedangkan untuk pernyataan negatif diberi nilai 1 poin untuk jawaban Salah (S) dan 0 poin untuk jawaban Benar (B).

b. Persepsi Wajib Pajak atas Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan adalah suatu hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang kompleks. Pengertian tingkat kepercayaan kepada pemerintah yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dapat memberikan pelayanan sesuai dengan pajak yang diberikan (adanya hubungan timbal balik). Tingkat kepercayaan dapat dimaksimalkan dengan adanya aturan-aturan yang bersifat memaksa. Menurut Diah Wahyu (2017:313) tingkat kepercayaan kepada pemerintah dapat diukur dengan menggunakan indikator diantaranya : percaya dengan kinerja pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang, keuangan dikelola dengan efisien dan transparan, merasakan

adanya manfaat yang didapatkan untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat, dan pemerintah bersikap adil pada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

c. Variabel Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Pajak

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:59) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/diapatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Variabel sanksi oleh fiskus pajak diukur dengan menggunakan empat indikator yang diungkapkan oleh Himavanta (2016) diantaranya: sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan, penerapan sanksi dilaksanakan dengan tegas, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka dikembangkan 31 pertanyaan yang berhubungan dengan variabel independen seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.2

Tabel 3.2

Pengembangan Pertanyaan Variabel Independen

Variabel Independen	Indikator	Instrumen / Pengukur
Tes Pengetahuan Perpajakan	Pengetahuan kognitif	14 item pertanyaan
Persepsi Wajib Pajak atas	Percaya dengan kinerja Pemerintah	3 item pertanyaan

Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah	Keuangan dikelola dengan transparan dan efisien	2 item pertanyaan
	Merasakan adanya manfaat yang didapatkan untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat	2 item pertanyaan
	Pemerintah bersikap adil pada masyarakat yang melakukan pelanggaran	2 item pertanyaan
Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Pajak	Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan	2 item pertanyaan
	Pengenaan sanksi dilaksanakan dengan tegas	2 item pertanyaan
	Sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan	2 item pertanyaan
	Penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku	2 item pertanyaan

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei langsung dengan memberikan kuesioner pada responden Wajib Pajak yang bekerja sebagai usahawan yang berada di wilayah Jakarta. Pada penelitian ini kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, hal ini menurut pengertian Sugiyono (dalam Chatarina, 2011: 42). Kuesioner dibagikan langsung kepada wajib pajak secara tertutup dimana wajib pajak hanya dapat memilih jawaban yang telah disediakan. Hasil dari jawaban responden dalam kuesioner yang nantinya kemudian diolah. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup sehingga responden hanya memilih pilihan jawaban yang dianggap paling sesuai. Menggunakan kuesioner karena dirasa paling relevan. Kuesioner yang digunakan terdiri dari lima bagian.

Bagian pertama terdiri dari lima pernyataan yang berisi informasi umum mengenai profil responden. Profil responden ini terdiri dari nama responden, jenis kelamin, jenis usaha, kepemilikan NPWP, dan pendidikan terakhir responden.

Bagian kedua mengenai kepatuhan wajib pajak dengan total empat belas pernyataan yang dibagi sesuai dengan indikator masing-masing. Seluruh pernyataan pada bagian ini berdasarkan pada pernyataan yang dibuat oleh Lilis Suryani (2017) dengan modifikasi. Pernyataan dapat dilihat pada tabel 3.3 nomor 1.

Bagian ketiga mengenai pengetahuan perpajakan dengan total empat belas pernyataan yang membahas pengetahuan perpajakan dalam ranah kognitif. Seluruh pernyataan pada bagian ini dibuat berdasarkan panduan buku Perpajakan oleh Prof Dr Mardiasmo (2016), buku Perpajakan Indonesia oleh Siti Kurnia Rahayu (2009), buku Perpajakan Indonesia oleh Waluyo

(2017), dan buku Perpajakan oleh Siti Resmi (2017) dengan dilakukan pengembangan kalimat. Pernyataan terdapat pada tabel 3.3 nomor 2.

Bagian keempat terdiri dari sembilan pernyataan mengenai tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Seluruh pertanyaan pada bagian ini berdasarkan pertanyaan yang dibuat oleh Diah Wahyu (2017) dengan modifikasi. Pernyataan terdapat pada tabel 3.3 nomor 3.

Bagian kelima membahas tentang persepsi sanksi pajak yang terdiri dari 8 item pertanyaan, yang dari setiap pertanyaan dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ada. Pertanyaan yang dicantumkan berdasarkan pertanyaan yang dibuat oleh Himavanta (2016) dengan beberapa modifikasi.

Pada tabel 3.3 dirincikan pertanyaan kuesioner untuk variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) terdapat 4 indikator yang paling akurat untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Indikator pertama yaitu kesadaran sebagai warga negara dikembangkan menjadi pertanyaan pada butir nomor 1,2,3,dan 4. Indikator kesadaran sebagai warga negara merupakan salah satu indikator yang diambil dari Siti Kurnia (2010:139) yang mengungkapkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, yaitu berupa kemauan wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP, dapat diartikan juga sadar sebagai warga negara yang baik wajib untuk mendaftarkan NPWP, hal ini mengacu pada teori *Behavioral beliefs*. Indikator kedua yaitu tunduk pada hukum dikembangkan menjadi pertanyaan pada butir nomor 5,6,7, dan 8. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang diambil dari Sarjeni Fatma (2013), hal ini sejalan dengan teori *Control beliefs* yang menggambarkan wajib pajak tunduk pada hukum, teori ini menjelaskan sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Indikator ketiga yaitu perilaku patuh dikembangkan menjadi pertanyaan pada butir nomor 9,10, dan 11. Perilaku patuh merupakan

salah satu indikator yang diambil dari Siti Kurnia (2010:139), Indikator ini diperkuat dengan teori *Behavioral beliefs*, teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator keempat yaitu lingkungan wajib pajak yang dikembangkan menjadi pertanyaan pada butir pertanyaan nomor 12,13, dan 14. Indikator lingkungan wajib pajak merupakan salah satu indikator yang diambil dari Sarjeni Fatma (2013), sedangkan teori yang mendukung kepatuhan wajib pajak yang disebabkan dari lingkungan sekitar yaitu *Normative beliefs*, dan diperkuat juga dengan teori atribusi yang menyatakan individu mengamati perilaku seseorang (lingkungan sekitarnya) yang akhirnya berdampak juga pada respons individu tersebut.

Variabel tes pengetahuan pajak (X1) diukur dari ranah kognitif dengan acuan sumber peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dalam 1 (satu) tahun pajak. Bersumber dari PP nomor 46 tahun 2013, bisa didapatkan informasi mengenai pengenaan tarif 1%, jika penghasilan melebihi 4,8M dasar pengenaan pajak seperti apa, yang menjadi dasar pertanyaan nomor 15-18.

Variabel persepsi wajib pajak atas tingkat kepercayaan kepada pemerintah (X2) mempunyai empat indikator yang diambil dari Osman dan Eren dalam Diah Wahyu (2017:313).Keempat indikator ini berdasarkan teori *Normatif beliefs*. Indikator pertama yaitu percaya dengan kinerja pemerintah, indikator ini sesuai dengan pernyataan Robbins (2015:4) yang diterjemahkan oleh Ainil mengungkapkan bahwa kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, hal ini sejalan dengan pengertian Lukman et al (2016) bahwa kepercayaan terjadi ketika warga menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, jujur dan adil. Variabel independen persepsi wajib pajak atas tingkat kepercayaan kepada pemerintah (X2) sejalan juga dengan teori

Normative beliefs, yang menyatakan adanya sistem perpajakan yang efisien dan efektif dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk berperilaku patuh. Indikator kedua yaitu keuangan dikelola secara transparan dan efisien, indikator ini sejalan dengan pengertian dari Widi Widodo et al (2010:43-44) yang mengungkapkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah perlu adanya *Transparency Index (TI)*, hal ini juga sejalan dengan teori *Normative beliefs*. Indikator ketiga yaitu manfaat yang didapatkan untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Indikator ini sejalan dengan pengertian kepercayaan menurut Kramer & Tylor (2016:311) yang diterjemahkan oleh Purnamasari et al. Kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (*calculative process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh, indikator ini juga sesuai dengan teori *Normative beliefs*, yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang efektif memberikan keyakinan untuk memilih perilaku taat pajak. Indikator keempat yaitu pemerintah bersikap adil pada masyarakat yang melakukan pelanggaran, hal ini sejalan dengan pernyataan menurut Robbins (2015:4) yang diterjemahkan oleh Ainil yang mengungkapkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga dapat diukur dari sikap pemerintah bersikap adil dengan memberikan pelanggaran yang sesuai bagi yang melanggar.

Variabel persepsi sanksi pajak (X3) memiliki 4 indikator yang diambil dari indikator yang diungkapkan oleh Himavanta (2016). Indikator pertama yang dapat mengukur sanksi pajak yaitu sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan, hal ini sesuai dengan teori *Control beliefs*, yang menyatakan bahwa sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sehingga tercipta kedisiplinan, pengertian ini juga sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2016:59) yang menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan agar ketentuan pajak dipatuhi sehingga tercipta kedisiplinan. Indikator kedua yaitu penerapan sanksi dilaksanakan dengan tegas, hal ini sesuai dengan indikator menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) yang mengungkapkan bahwa

sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas tanpa ada kergauan. Pernyataan ini juga mengacu pada teori Ilyas dan Burton (2010) yang berpendapat dalam Arum (2012) bahwa pemberian sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen dan tegas. Indikator ketiga yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, hal ini sejalan dengan indikator yang dinyatakan oleh Adam Smith dalam (Siti Kurnia Rahayu, 2010:63) bahwa sanksi pajak yang dikenakan harus seimbang, maksudnya sanksi dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Indikator keempat yang diambil untuk mengukur persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan yaitu penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Siti Resmi (2017:61), bahwa sanksi pajak terjadi karena adanya pelanggaran akan undang-undang, oleh karena itu sanksi pajak harus dikenakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, pernyataan ini juga sesuai dengan indikator yang diungkapkan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) yang menyatakan bahwa sanksi harus dikenakan sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.

Di bawah ini disajikan tabel kuesioner 3.3 yang berisi tentang rincian indikator dan pertanyaan untuk setiap variabel dependen dan independen.

Tabel 3.3**Pertanyaan Kuesioner**

No	Variabel	Indikator	Nomor item	Soal
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	a. Kesadaran sebagai warga negara	1,2,3,4	1. Saya mendaftarkan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik
				2. Dengan membayar pajak saya berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara
				3. Saya menganggap kedudukan pajak sangat penting
				4. Saya membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran
		b. Tunduk pada hukum	5,6,7,8	5. Saya membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan
				6. Saya bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak jika ada data yang tidak benar
				7. Saya bersedia dikenakan sanksi administrasi/sanksi pidana apabila melanggar
				8. Saya bersedia mematuhi tatacara perpajakan yang berlaku
		c. Perilaku Patuh	9,10,11	9. Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak

				10. Saya patuh dalam melaporkan SPT masa dan tahunan
				11. Saya menghitung pajak terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan
		d. Lingkungan Wajib Pajak	12,13,14	12. Teman-teman dan rekan satu profesi di lingkungan saya mendorong saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan
				13. Petugas Pajak memberikan saya saran dan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak
				14. Banyaknya KPP yang ada disekitar rumah memudahkan saya untuk melaporkan pajak
2.	Tes Pengetahuan Perpajakan (X_1)	a. Pengetahuan kognitif	15-28	15. Tata cara mengenai pajak penghasilan dari usaha yang dimiliki dengan peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013
				16. Kewajiban Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat (2)
				17. SPT Masa PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

				18. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir Tahun Pajak
				19. Kode billing digunakan untuk dapat membayar pajak secara elektronik
				20. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP
				21. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebesar Rp 1.000.000.
				22. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi usahawan menggunakan formulir 1770.
				23. Wajib pajak orang pribadi usahawan yang mempunyai penghasilan dari berbagai sumber mengisi formulir 1770S
				24. Penghasilan dalam satu tahun pajak melebihi 4,8 M dikenakan tarif PPh Pasal 17

				25. Usaha Kecil yang penghasilan bruto dalam 1 tahun pajak tidak melebihi 4,8M dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulannya.
				26. Wajib pajak yang melakukan penyetoran PPh Final 1% tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan
				27. Tarif pajak penghasilan sebesar 1% final dari peredaran bruto
				28. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan final adalah jumlah peredaran netto
3.	Persepsi Wajib Pajak atas Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X ₂)	a. Percaya dengan kinerja Pemerintah	29, 30, 31	29. Saya percaya politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik
				30. Saya percaya pemungutan pajak dialokasikan kembali ke rakyat
				31. Saya merasa adanya kesesuaian antara jumlah dana

				yang diberikan dengan realisasi kinerja pemerintah
		b. Keuangan dikelola dengan transparan dan efisien	32,33	32. Informasi mengenai pengeluaran dan pendapatan pemerintah bisa saya akses secara mudah lewat internet
				33. Saya percaya pajak yang disalurkan untuk pengeluaran pemerintah bisa mencapai hasil maksimal
		c. manfaat yang didapatkan untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat	34,35	34. Saya percaya semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun dari pemungutan pajak
				35. Saya percaya Manfaat pajak yang paling saya rasakan adalah pemerataan ekonomi
		d. pemerintah bersikap adil pada masyarakat yang melakukan pelanggaran	36,37	36. saya percaya bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil
				37. Saya percaya pemerintah berlaku adil bagi masyarakat yang melanggar pajak

4.	Persepsi Sanksi Pajak (X_3)	a. sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisipinan	38,39	38. Menurut saya sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
				39. Apabila sanksi diperbesar, saya akan semakin tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan
		b. peneraan sanksi dilaksanakan dengan tegas	40,41	40. Menurut saya sanksi perpajakan dilaksanakan adil terhadap semua subjek pajak
				41. Saya setuju sanksi pajak yang tegas akan menimbulkan efek jera untuk melanggar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak
		c. sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan	42,43	42. Saya bersedia dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar/kurang dalam membayar pajak terutang saat jatuh tempo
				43. Saya bersedia dikenakan sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan
		d. peneraan sanksi pajak sesuai dengan	44,45	44. Saya setuju denda keterlambatan penyampaian SPT

		peraturan yang berlaku		Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000
				45. Saya setuju sanksi pajak akan dikenakan jika tidak melaporkan SPT Tahunan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak

E. Teknik Pemilihan dan Pengambilan Sampel

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei langsung dengan memberikan kuesioner pada responden Wajib Pajak usahawan yang berada di Jakarta. Pada penelitian ini kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Penelitian kali ini menggunakan data kuesioner pada sampel berupa Wajib Pajak usahawan yang digunakan dalam penelitian.

Kuesioner ini dibagikan kepada responden untuk mengukur tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan pengaruh sanksi oleh fiskus pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Sedangkan untuk mengukur variabel pengetahuan Wajib Pajak diuji dengan test. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan seprangkat pertanyaan tertulis yang sudah disediakan responden yang mewakili siap varibael yang ada dalam penelitian sehingga akan didapatkan informasi mengenai pengetahuan wajib pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan sanksi oleh fiskus pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

F. Teknik Pengolahan Data

Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh responden usahawan di wilayah Jakarta. Kuesioner ini disusun dengan skala likert 1-5 yang biasa digunakan sehingga responden diharapkan tidak mengalami kesulitan dalam menjawab dan juga memudahkan analisis.

Setiap pernyataan menggunakan skala satu sampai lima untuk mendapat rentang jawaban sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan memberikan tanda cek (√) atau silang (X) pada kolom yang dipilih. Pada kuesioner penelitian, kriteria dari setiap pendapat responden dinilai secara berikut :

Tabel 3.4

Kriteria Nilai Pernyataan

Skor	Pendapat
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Agar setiap instrument pertanyaan yang digunakan untuk penelitian ini berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

1) Uji Validitas

Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrument. Untuk menguji apakah angket yang digunakan memenuhi syarat validitas, pada dasarnya digunakan korelasi Pearson.

Pengujian validitas juga dapat dilakukan dengan program SPSS. Menurut Imam Ghozali (2011 : 52-59), mengukur tingkat validitas melalui SPSS dapat diukur dengan cara:

- a. Melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk
- Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk *degree of freedom* = n-k dan satu daerah sisi pengujian dengan *alpha* 0,05. Jika r hitung untuk r tiap butir pertanyaan bernilai positif, dan lebih besar dari r tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Menurut Duwi Priyatno (dalam Lusyan, 2012:117) validitas instrumen dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

- X = variabel 1
- Y = variabel 2
- N = banyaknya pengamatan

b. *Coefficient Corelation* Pearson

Uji validitas dapat juga dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Hal ini dapat dilakukan melalui program SPSS dengan cara:

- 1) buka file yang bersangkutan;

- 2) pilih menu *statistic/analyze*, kemudian pilih submenu *correlate*, lalu *bivariate*;
- 3) box variabel diisi dengan skor butir pertanyaan dan skor total;
- 4) pilih *Coefficient Corelation Pearson*;
- 5) tekan OK.

2) Uji Reliabilitas

Pengertian reabilitas menurut Imam Ghozali (2016:47), yaitu merupakan suatu alat ukur untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama yaitu AUTONOMI.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Cronbach Alpha* karena alternatif jawaban lebih dari dua. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 20 setelah data induk ditabulasikan dan data SPSS telah dibangun, maka pilih *analyze* → *scale* → *reliability analysis* untuk menguji reabilitasnya. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Imam Ghozali 2016:48).

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Nilai *alpha cronbach* > nilai r tabel (0,700), maka instrumen dinyatakan *reliable*.
2. Nilai *alpha cronbach* < nilai r tabel (0,700), maka instrumen dinyatakan tidak *reliable*.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap data yang sudah didapatkan agar data tersebut dapat memberikan suatu kesimpulan. Hasil pengolahan data

ini dilakukan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Berikut merupakan analisis-
analisis data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda menghitung satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model. Uji regresi berganda ini digunakan untuk mengukur pengetahuan wajib pajak, tingkat kepercayaan, dan sanksi pajak. Hubungan antara variabel dependen dengan independen digambarkan dalam persamaan sebagai berikut;

$$\text{Patuh} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pengetahuan} + \beta_2 \text{Percaya} + \beta_3 \text{Sanksi} + \varepsilon$$

Keterangan :

Patuh : kepatuhan wajib pajak

β_0 : konstanta regresi

$\beta_1 - \beta_3$: koefisien variabel

Pengetahuan : Kesadaran wajib pajak

Percaya : tingkat kepercayaan kepada pemerintah

Sanksi : sanksi perpajakan

ε : error

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram *standardized residual* dan PP plot *standardized residual*. Ghazali (2006) mengatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, apabila histogram *standardized residual* membentuk kurva normal dan PP *standardized residual* mendekati garis diagonal maka data berdistribusi normal. Asumsi normalitas data di penuhi jika nilai statistik Kolmogorof – Smirnov diatas tingkat signifikansi tertentu:

1. Apabila tingkat signifikansi < 0.05 maka distribusi data tidak normal
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ berarti distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, *standard error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya, Ghazali, (2006). Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variabel dengan

menggunakan *Variance Inflating Factor (VIF)*. Batas dari *VIF* adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Dengan uji asumsi:

1. Jika nilai *VIF* > dari 10 dan nilai *tolerance value* < 0,1 maka terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai *VIF* 0,1 maka tidak terjadi multikoliniearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual ($y \text{ prediksi} - y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan psengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series).

Tetapi pada data *crosssectional*, masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal individu dalam Imam Ghozali (2016 :107)

Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan alat uji *Durbin-Watson* (DW). Alat uji *Durbin-Watson* (DW) mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- 1) $DU \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq 4-DU$ berarti tidak terdapat autokorelasi.
- 2) $DL \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq 4-DU \leq DW \leq 4-DL$ berarti tidak dapat disimpulkan.
- 3) $0 \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq DL$ berarti terjadi autokorelasi positif.
- 4) $DL \leq \text{Durbin-Watson (DW)} \leq 4$ berarti terjadi autokorelasi negatif

3. Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi dalam mengukur dapat dilihat dari nilai statistik t, nilai statistik F, serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai uji menolak H_0 . Sebaliknya, apabila nilai perhitungan statistik terima H_0 , maka dinilai tidak signifikan.

a. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan bantuan program SPSS dan melihat tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 pada tabel ANOVA.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti signifikan, sebaliknya jika signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti tidak signifikan. Berikut merupakan hipotesis statistik dari penelitian ini:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 > 0$$

b. Uji t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk memastikan dan membandingkan apakah variabel independen yang ada sama atau berbeda. Uji t dilakukan dengan bantuan program SPSS. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05 yang dilihat pada tabel *coefficient*. Penelitian ini menggunakan signifikansi *one tail*. Kriteria pengujian uji t pada penelitian ini adalah jika signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti signifikan, sedangkan signifikan $> 0,05$, maka H_0 diterima yang berarti tidak signifikan. Berikut merupakan hipotesis secara statistik:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 > 0$$

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 > 0$$

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 > 0$$

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi atau presentasi sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinan antara nol sampai satu. Bila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya jika semakin mendekati nol maka menunjukkan semakin lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.